

BAB III

KONFLIK SURIAH DAN PERANG PROKSI ARAB SAUDI TERHADAP IRAN DI KONFLIK TERSEBUT

Penulis disini akan menjelaskan Konflik Suriah dari tahun 2011-2018, mulai dari profil negara Suriah itu sendiri, kemudian kronologi konflik yang meliputi *Arab Spring* dan eskalasi konflik, aktor-aktor, serta keterlibatan Arab Saudi dalam Konflik Suriah.

A. Profil Negara Suriah

Suriah atau yang secara resmi disebut Republik Arab Suriah (bahasa Arab: الجمهورية العربية السورية *Al-Jumhūriyyah al-'Arabīyyah as-Sūriyyah*) merupakan salah satu negara di Timur Tengah dengan jumlah penduduk 18.27 juta yang terdiri dari berbagai macam etnis/suku, Arab, Kurdi, Armenia Sarkis, dan Beduin. Pemeluk Agama di Suriah terdiri dari Islam (Sunni 74%), Alawit/Syiah dan Druzel (16%), Kristen, dan lain-lain (10%). Meskipun mayoritas penduduknya merupakan muslim Sunni, namun yang memegang rezim pemerintahan justru Syiah (Al Jazeera, 2011). Suriah dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad sejak tahun 2000 dengan wakilnya Najah al-Attar yang dipilih pada tahun 2006 (Kementerian Luar Negeri Indonesia, t.thn.).

Suriah memiliki luas wilayah 185.180 km², termasuk dataran tinggi Golan yang diduduki Israel seluas 1.295 km². Wilayah Suriah terletak di 39 derajat Garis Bujur Barat, 47 derajat Garis Bujur Timur, 41.5 derajat Garis Lintang Utara dan 36 derajat Garis Lintang Selatan dan kelilingi oleh Turki (845 km) di sebelah Utara, Irak (596 km) di Timur, Laut tengah (183 km); Israel (74 km); Libanon (359 km) di Barat serta Yordania (356 km) di Selatan. Suriah beriklim Mediteranian (sub tropis) dan-

mempunyai empat musim yaitu Musim Dingin (Desember-Februari, 5-15°C), Musim Semi (Maret-Mei, 15-30°C), Musim Panas (Juni-September, 30-40°C), dan Musim Gugur (akhir September-Nopember, 15-25°C). (Kementerian Luar Negeri Indonesia, t.thn.).

1. Sejarah

Pasca Perang Dunia I, Prancis memperoleh mandat atas wilayah Suriah yang merupakan bekas provinsi kerajaan Turki Ottoman. Daerah tersebut dikelola oleh Prancis hingga pada tahun 1946 dimerdekakan dengan nama Republik Arab Suriah. Setelah dimerdekakan, Suriah ternyata tidak mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang menyebabkan serangkaian kudeta serta konflik terjadi di tahun-tahun awal kemerdekaan. Pada tahun 1958, Suriah dan Mesir menyatukan diri dengan membentuk negara United Arab Republic (UAR). Tapi penyatuan kedua negara tidak mampu bertahan lama disebabkan Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser justru mengesampingkan elit-elit politik Suriah dan melakukan sentralisasi pemerintahan di Mesir. Sehingga dari pada disebut penyatuan, situasi kedua negara lebih seperti hubungan negara penjajah dengan koloninya. Suriah kemudian melepaskan diri dan mendirikan kembali Republik Arab Suriah (Al Jazeera, 2011).

Pada Nopember tahun 1970, Hafez al-Assad dari partai Ba'ath Sosialis yang sekaligus merupakan minoritas Alawit/Syiah, merebut tahta kekuasaan Suriah melalui kudeta tak berdarah. Meskipun, berhasil membawa stabilitas politik di Suriah, Hafez al-Assad menerapkan rezim otoriter yang berlangsung selama 30 tahun. Setelah kematiannya, sang putra, yaitu Bashar al-Assad, terpilih menjadi Presiden Suriah secara resmi pada tahun 2000. Ia dianggap sebagai tokoh pembaharu Suriah. Saat mengucapkan sumpah sebagai Presiden, Bashar al-Assad berjanji akan mereformasi politik dan ekonomi Suriah. Satu tahun pertamanya, dari bulan Juli tahun 2000 sampai Februari 2001, dikenal sebagai *Damascus Spring* karena

keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dan pembangunan yang berlangsung di masa itu (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 2). Akan tetapi, akibat dari rezim ayahnya, banyak pihak meragukan kepemimpinan rezim baru. Masyarakat tetap saja beranggapan bahwa sang putra cepat atau lambat akan mengikuti apa yang diterapkan oleh ayahnya. Presiden Bashar al-Assad tidak lama kemudian menutup kembali keterbukaan pemerintah dan membungkam pihak-pihak oposisi. 7 tahun kemudian, ia kembali terpilih menjadi Presiden untuk kedua kalinya, kali ini bersama dengan Wakil Presiden Najah al-Attar, tokoh wanita Arab pertama yang menjabat posisi tersebut (Al Jazeera, 2011).

2. Ekonomi

Suriah menggunakan mata uang Syrian Pound (SYP), 2018 (US\$ 1 = SYP 515.230) dan memiliki tingkat inflasi sebesar 27.10%. Per tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Suriah mengalami kenaikan dari yang sebelumnya hanya -5.30% menjadi -3,40%, dengan GDP per kapita US\$ 1700, dan GDP US\$ 73.67 miliar,. (Trading Economics, t.thn.).

Sistem Ekonomi Suriah menggunakan sistem Ekonomi Pasar Sosialis (paduan antara konsep Ekonomi Sosialis dan Liberal-Kapitalis) yang bergantung pada dua sektor, yaitu minyak dan pertanian yang masing-masing menyumbang sekitar seperempat GDP. Artinya, kurang lebih 50% GDP Suriah berasal dari sektor pertanian dan minyak. Sejalan dengan data tadi, penipisan cadangan minyak secara bertahap, mengakibatkan hampir 10% penduduk Suriah hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah pengangguran mencapai 15.20% dari total populasi 18.27 juta (Al Jazeera, 2011).

Hasil ekspor utama Suriah adalah minyak mentah, hasil minyak, buah-buahan, pakaian, daging, dan hewan ternak. Diversifikasi ekonomi melalui sektor lain, seperti keuangan, jasa, konstruksi, telekomunikasi, pariwisata, perdagangan, dan industri tanpa minyak dilakukan untuk terus mendorong

pertumbuhan secara perlahan (Kementerian Luar Negeri Indonesia, t.thn.)

3. Hubungan Luar Negeri

Selama beberapa tahun terakhir, Suriah memiliki hubungan yang kompleks dengan komunitas internasional, khususnya dunia Barat. Sejak Presiden Bashar al-Assad terpilih untuk kedua kalinya pada tanggal 19 Juli 2007, Suriah seringkali membuat kebijakan yang dianggap mengancam kepentingan Barat di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Suriah dalam beberapa konflik kawasan seperti di Lebanon dengan mendukung kelompok perlawanan Hizbullah dan insiden bom Baghdad pada bulan Agustus 2009 di Irak menyebabkan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, serta beberapa negara Eropa lainnya membatasi kontak dengan pemerintah Suriah. Sehingga dapat dikatakan Suriah berada dalam situasi dikucilkan oleh dunia Barat (Al Jazeera, 2011). Pengucilan dunia Barat terhadap Suriah ternyata justru mendapat dukungan dari negara Dunia Arab moderat (Arab Saudi, Jordan, Kuwait, Mesir, dan Uni Emirat Arab), khususnya Arab Saudi dan Mesir. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor kedekatan hubungan Suriah-Iran (Kementerian Luar Negeri Indonesia, t.thn.).

Suriah memiliki hubungan yang baik dengan Iran, keduanya terikat dalam perjanjian pakta pertahanan dimana penandatanganan *Memorandum of Defence* dilaksanakan pada Juli 2006. Selain itu, Suriah telah menjalin hubungan bilateral yang cukup terjaga dengan beberapa negara, diantaranya Irak dan Turki. Suriah dan Irak pada tanggal 21 Nopember 2006 sepakat menandatangani pemulihan hubungan diplomatik kedua negara yang sempat terputus selama 25 tahun. Kemudian, Turki melalui Perdana Menteri-nya saat itu Recep Tayyip Erdogan¹, menandatangani berbagai perjanjian bilateral. Salah satunya, Turki berjanji akan bertindak sebagai perantara damai antara Suriah-Israel yang selama ini identik dengan keadaan

¹ Saat ini menjabat sebagai Presiden Turki ke-12

perang. Meskipun begitu, pada akhirnya hubungan Suriah-Israel terbilang sangat kompleks karena kedekatan Suriah-Iran menyebabkan Israel enggan membangun hubungan selama tentara Iran masih terlibat di Konflik Suriah (Al Jazeera, 2011).

B. Kronologi Konflik

1. Arab Spring

Sudah lebih dari 17 tahun sejak Presiden Bashar al-Assad (51 tahun) memimpin Suriah, Ia menunjukkan karakteristik pemerintahan otoriter sama seperti ayahnya, masa pemerintahannya pun disebut sebagai 'Dinasti Assad' (Ali & Addley, 2011). Gelombang Arab Spring yang terjadi di Tunisia dan Mesir telah menginspirasi negara-negara Timur Tengah (termasuk Suriah) untuk melakukan revolusi, hal ini berujung pada Konflik Suriah (BBC, 2016).

Demonstrasi di Suriah dimulai pada bulan Maret tahun 2011 di Kota Deraa. Alasan demonstran turun ke jalan adalah karena pemerintah menangkap dan menyiksa 15 orang anak sekolah yang membuat tulisan anti-pemerintah di sebuah dinding. Masyarakat berbondong-bondong berkumpul di jalan menyuarkan pembebasan anak-anak, dan menuntut martabat serta kebebasan rakyat kepada Presiden Bashar al-Assad. Mulanya, tidak ada satupun demonstrasi yang menginginkan rezim Bashar al-Assad untuk mundur (Sinjab, 2013). Masyarakat justru berharap banyak pada sang Presiden muda agar dapat merespon tuntutan tersebut. Demonstrasi ini kemudian berubah dari demonstrasi damai dimana mawar dibagikan kepada petugas keamanan dan tentara, menjadi medan perang sipil antara pihak pemerintah melawan masyarakat. Pemicunya adalah tragedi penembakan oleh tentara yang menyebabkan 4 orang demonstran meninggal pada tanggal 18 Maret 2011. Masyarakat terkejut akan tragedi ini, mereka kemudian menuntut lebih dari martabat dan kebebasan,

masyarakat ingin Presiden Bashar al-Assad mundur dari jabatannya (BBC, 2017).

2. Eskalasi Konflik

Selama Konflik Suriah berlangsung, dilansir dari data yang dikumpulkan Geneva International Centre for Justice, jumlah korban meliputi:

Gambar 3.1 Jumlah Korban Konflik Suriah

The Syrian Conflict in Numbers (information updated to December 2016):

13.5 million people are in need of humanitarian assistance



11+ million people require health assistance



8.7 million people have acute needs across multiple sectors



4.5 million people live in hard-to-reach besieged areas



6.3 million internally displaced persons



4.7 million refugees



2.4 million people lack adequate shelter



2+ million children and adolescents out of school



1.5 million people with disabilities



450,000+ people were killed



Sumber: Geneva International Centre for Justice. (2017). Syrian Civil War: Six Years into the Worst.

Jumlah korban sebesar ini tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa kunci pada saat Konflik Suriah berlangsung. Dalam sub-bab Eskalasi Konflik, penulis meruntutkan peristiwa-peristiwa kunci yang terjadi di Konflik Suriah sejak periode 2011-2018 (Associated Press Bloomberg, 2018), antara lain:

a. Maret 2011

Pada tanggal 15, di kota tua Damaskus, masyarakat turun ke jalan untuk memprotes penangkapan dan penyiksaan 15 orang anak-anak yang membuat tulisan anti-pemerintah di sebuah dinding. Demonstrasi kemudian menyebar keseluruh penjuru Suriah. Tepat 3 hari setelah demonstrasi di Damaskus, yaitu pada tanggal 18, pasukan keamanan beserta tentara mulai menembaki demonstran di Daraa yang menyebabkan tewasnya 4 orang demonstran. Sama halnya dengan demonstrasi yang menyebar, pembantaian pun menyebar luas setelah peristiwa penembakan.

b. April 2011

Pasukan keamanan menyerbu kota terbesar ketiga di Suriah yaitu Homs, dimana ribuan orang mencoba menciptakan suasana demonstrasi yang sama dengan apa yang terjadi di Tahrir Square, Kairo, Mesir, pada saat diktator Mesir, Presiden Hosni Mubarak di protes.

c. Agustus 2011

Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, meminta Bashar al-Assad untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan memerintahkan aset pemerintah Suriah dibekukan.

d. Juli 2012

Pada tanggal 18 Juli 2012, terjadi pengeboman di Gedung Keamanan Nasional Damaskus pada saat pertemuan tingkat tinggi yang membahas krisis pemerintah mengenai terbunuhnya empat orang pejabat tinggi Suriah, termasuk diantaranya saudara ipar Presiden Bashar al-Assad. Masih di bulan yang sama, pejuang oposisi mulai menyebar ke Aleppo yang merupakan kota terbesar di Suriah dan juga bekas ibu kota perdagangan.

e. Agustus 2012

Obama menyampaikan kepada publik apabila pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dalam konflik yang sedang berlangsung, maka tindakan itu akan menjadi 'garis merah' atau penanda bagi Amerika Serikat untuk mempertimbangkan melakukan intervensi ke Konflik Suriah.

f. Maret 2013

Pemerintah Suriah dan pihak oposisi saling menuduh satu sama lain terhadap serangan gas yang menewaskan 26 orang, dimana selusin diantaranya merupakan tentara pemerintah. Serangan terjadi di kota Khan al-Assal, Suriah Utara. Penyelidikan dari *United Nations* (UN) menemukan bahwa gas sarin memang terbukti digunakan, tetapi UN tidak mengkonfirmasi maupun mengidentifikasi siapa pelaku yang melakukan serangan gas.

g. Mei 2013

Kelompok Hizbullah dari Lebanon ikut bergabung bersama pasukan pemerintah Suriah menyerang dan menduduki kota perbatasan Qusair.

h. Agustus 2013

Pada tanggal 21 Agustus 2013, serangan senjata kimia di pinggiran kota Ghouta Timur menewaskan setidaknya berkisar antara 281 hingga 1729 orang ditambah 3600 orang mengalami luka fatal. Serangan ini dikenal sebagai penggunaan senjata kimia paling mematikan sejak Perang Iran-Irak. Amerika Serikat menuduh pasukan pemerintah Suriah yang melakukan serangan.

i. September 2013

Amerika Serikat dan Rusia melalui *United Nations Security Council* (UNSC) secara mengejutkan sepakat untuk memerintahkan Suriah mempertanggungjawabkan serangan yang terjadi di Ghouta Timur dan menghancurkan sisa persediaan senjata kimia milik pemerintah.

j. Oktober 2013

Pada tanggal 14 Oktober 2013, Suriah secara resmi menandatangani *Chemical Weapons Convention* (CWC) yang mulanya dirancang pada tanggal 3 September 1992 di Paris dan mulai diratifikasi pada tanggal 13 Januari 1993 di New York. Adapun poin yang harus diperhatikan, yaitu CWC melarang Suriah memproduksi, menyimpan, dan menggunakan senjata kimia.

k. Juni 2014

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) mengatakan bahwa mereka telah menindaklanjuti kejadian di tahun 2013 dengan menghancurkan sisa-sisa senjata kimia pemerintah Suriah.

l. Juni 2014

Kelompok ekstremis Islam, *Islamic State* mendeklarasikan wilayah Irak dan Suriah berada dibawah kuasa kekhalifahan. Kelompok ini kemudian lebih dikenal dengan nama *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS).

m. September 2014

Amerika Serikat melancarkan serangan udara kepada kelompok ISIS di Suriah.

n. Maret 2015

Kota Idlib di Barat Laut jatuh kepada kelompok Islam yang dipimpin oleh salah satu afiliasi al-Qaeda, yaitu Jabhat al-Nusra.

o. Mei 2015

Presiden Bashar al-Assad mengakui pasukan militernya mulai kewalahan dalam menghadapi periode yang berat akibat serangan-serangan dari pihak oposisi yang memukul mundur militer Suriah.

p. September 2015

Rusia melancarkan serangan udara ke pihak oposisi khususnya ISIS di provinsi Homs dan Hama. Serangan ini menandai keterlibatan Rusia secara langsung di Konflik Suriah dan menegaskan komitmen Rusia mendukung rezim Assad mempertahankan kekuasaannya.

q. Agustus 2016

Pasukan Turki menyebrang ke Suriah Utara dan merebut daerah di sepanjang perbatasan Suriah-Turki dari kelompok ISIS karena khawatir keberadaan mereka akan mengancam keamanan nasional Turki.

r. Desember 2016

Pihak oposisi mengevakuasi bagian Utara kota Aleppo dari *Operation Dawn of Victory* yang diinisiasi pemerintah Suriah. Serangan dilaksanakan setelah berakhirnya moratorium serangan udara Rusia.

s. April 2017

Pada tanggal 4 April, 58 orang tewas akibat serangan gas saraf di kota Khan Seikhoun, provinsi Idlib yang dikuasai oleh pihak oposisi. Saksi mata mengatakan serangan gas saraf dijatuhkan dari pesawat jet Sukhoi Rusia atau Suriah. Kedua negara sama-sama menolak bertanggung jawab atas insiden di kota Khan Seikhoun. Dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 6 April, Amerika Serikat menembakkan rentetan peluru kendali ke Suriah sebagai jawaban atas serangan di kota Khan Sheikhoun. Serangan ini menandai pertama kalinya Amerika Serikat terlibat secara langsung di Konflik Suriah.

t. Mei 2017

Pihak oposisi meninggalkan wilayah terakhir yang mereka kuasai, yaitu kota Homs. Kota ini dulunya merupakan titik permulaan Konflik Suriah dan dijuluki sebagai ibu kota revolusi.

u. Januari 2018

Turki memulai operasi militer besar-besaran dengan sandi Operasi Ranting Zaitun untuk melawan para pejuang Kurdi di wilayah Utara Suriah, Afrin.

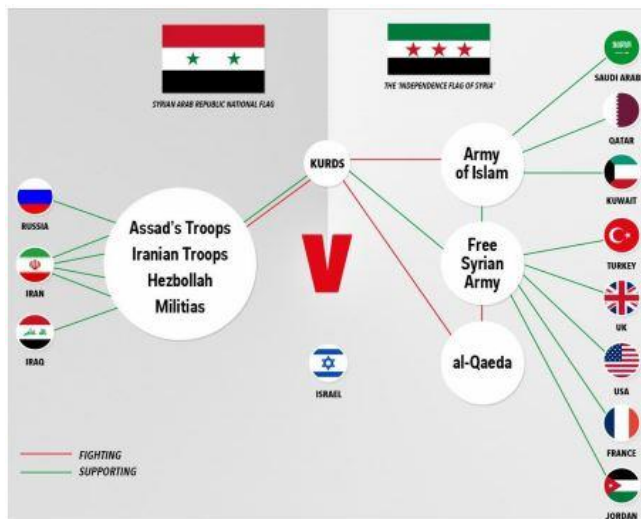
v. February 2018

Suriah mengirim pasukannya dalam jumlah besar untuk mengusir pihak oposisi dari Ghouta Timur.

3. Peta Konflik Suriah

Sejak awal konflik berlangsung pada tahun 2011, peta Konflik Suriah telah berkembang dalam hal skala dan ruang lingkup. Banyaknya aktor yang terlibat ke dalam Konflik Suriah menjadikan konflik ini semakin kompleks. Aktor-aktor tersebut tidak hanya aktor negara, namun juga aktor-aktor non-negara.

*Gambar 2.3 Siapa melawan siapa?
Aktor-aktor yang terlibat dalam Konflik Suriah*



*Sumber: Geneva International Centre for Justice. (2017).
Syrian Civil War: Six Years into the Worst.*

Pemerintah Suriah: Pasukan Bashar al-Assad

Awal mula Konflik Suriah tidak terlepas dari tindakan represif yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap pihak oposisi yang berusaha melakukan revolusi untuk membangun kembali Suriah yang menjunjung martabat dan kebebasan rakyatnya. Kegagalan pemerintah Suriah menyelesaikan permasalahan demonstran melalui negosiasi damai dan konstruktif memicu tumbuh berkembangnya lingkaran kekerasan yang mematikan. Pada dua tahun awal konflik berlangsung, pemerintah Suriah sudah berada diambang kehancuran. Pihak oposisi menguasai wilayah-wilayah strategis penggerak infrastuktur dan penghasil utama minyak. Akan tetapi, akibat keterlibatan militer Rusia ke dalam konflik yang mendukung rezim Assad, membuat pemerintah Suriah berhasil merebut kembali 45% wilayah yang dikuasai pihak oposisi, diantaranya kota Damaskus, Homs, Aleppo, Latakia, dan Tartous (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 5).

Free Syrian Army (FSA)

FSA yang pertama kali muncul merupakan gerakan anti pemerintah yang mendapatkan dukungan berupa senjata dan suntikan dana jutaan dollar dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Turki, Arab Saudi, Prancis, serta Qatar. Meningkatnya eskalasi konflik di Suriah menyebabkan pihak oposisi moderat yang memulai demonstrasi pada tahun 2011 ini kehilangan persatuannya. Saat ini FSA terbagi menjadi 60 kelompok militer yang berbeda. Bahkan disebutkan oleh beberapa sumber, sebagian pejuang FSA bergabung dengan Jabhat al-Nusra dan sebagian lainnya berperang bersama Turki di Suriah Utara. Akibatnya, sangat sulit untuk mengidentifikasi pihak oposisi yang benar-benar berpusat dan terfokus pada perjuangan pembebasan rakyat Suriah dari kediktatoran. Terlebih lagi, campur tangan kekuatan asing dan kelompok terorisme ke dalam Konflik Suriah menjadikan situasi semakin rumit (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 5).

Jabhat al-Nusra

Jabhat al-Nusra merupakan salah satu lawan pemerintah Suriah yang paling agresif dan kejam. Faktanya, kelompok ini adalah bagian dari afiliasi al-Qaeda yang bertanggung jawab atas 600 serangan di beberapa kota Suriah seperti Damaskus, Aleppo, Hama, Daraa, Homs, Idlib, dan Deir al-Zor. Selama serangan berlangsung banyak warga sipil ikut terbunuh. Amerika Serikat mengkategorikan Jabhat al-Nusra sebagai organisasi terorisme (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 6).

Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS)

Keterlibatan ISIS dalam Konflik Suriah membuat ruang lingkup konflik semakin besar. Faktanya, 67 negara menyatakan akan bergabung ke medan perang demi melawan ISIS dan menghentikan pertumbuhan salah satu organisasi teroris terbesar sekaligus terkaya abad 21. Hingga saat ini, ISIS memiliki lebih dari 300-400 ribu ahli yang berasal dari 74 negara dan menguasai 30% wilayah Suriah. Anggaran ISIS diperkirakan mencapai US\$ 2 miliar. Banyak pakar berspekulasi anggaran ini berasal dari jual beli pasar gelap. Namun, tidak dapat dipungkiri keterlibatan ISIS ke dalam Konflik Suriah memungkinkan mengalirnya pendanaan dari dunia Barat (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 6).

Kurdi

Pada Konflik Suriah, sebagai aktor konflik, orang Kurdi mewakili elemen yang rumit. Kurdi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah, sebagian besar dari mereka menghuni daerah Kurdistan yang meliputi Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Hubungan antara Kurdi dan pemerintah Suriah telah mencapai titik kritis. Sehingga situasi ini bisa mengarah kepada kerjasama atau malah sebaliknya. Keterlibatan Kurdi pada Konflik Suriah sudah tidak dapat dibendung lagi. Khususnya pada awal konflik bergulir, Kurdi bertempur bersama dengan FSA melawan pemerintah Suriah. Terlebih Kurdi juga diburu oleh Turki yang

menganggap mereka teroris. Pada perkembangannya, saat ini Kurdi berdiri sendiri sebagai aktor independen di wilayah Suriah dan telah memisahkan diri dari FSA. (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 7)

Hizbullah

Hizbullah secara aktif mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad. Pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan, Hizbullah akan terus berada di Suriah selama Presiden Bashar al-Assad menginginkannya (Firmansyah, 2018). Ribuan pasukan Hizbullah telah dikirimkan ke Suriah dan sekitar 1500 telah gugur di medan perang (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 7).

Russia

Rusia adalah salah satu mitra terpenting pemerintah Suriah yang sangat menentukan jalannya konflik. Sejauh ini, Rusia telah membantu Suriah dengan menggunakan hak veto untuk yang ke-12 kalinya terhadap resolusi UNSC demi memblokir usaha-usaha yang dapat merugikan pemerintah Suriah (RTÉ, 2018). Secara khusus, veto dari Rusia didasari oleh anggapan bahwa intervensi dari PBB justru akan memperburuk keadaan Suriah karena tidak ada pemimpin lain yang lebih stabil selain Presiden Bashar al-Assad untuk memikul tanggung jawab kekuasaan Suriah. Selain itu, Rusia juga menganggap Konflik Suriah sebagai bisnis. Bagi Rusia, Suriah adalah konsumen terbesar dari ekspor senjata mereka. Resolusi konflik di Suriah bisa berarti perdagangan senjata antar keduanya akan berakhir.

Perlu diketahui bahwa pangkalan militer Rusia yang berada di luar wilayahnya hanya ada di Suriah, yaitu angkatan laut di pelabuhan Tartous, dan angkatan udara di Latakia. Pangkalan militer tersebut berfungsi sebagai basis pertahanan Rusia di laut Mediterania, dan ujung tombak Rusia melawan Barat di Timur Tengah. Kehilangan Suriah akan menjadi pukulan telak bagi Rusia, oleh karena itu keterlibatan Rusia

secara langsung pada serangan udara bulan September 2015 adalah jawaban Rusia agar pihak oposisi tidak besar kepala terlebih dahulu. Nyatanya, pihak oposisi dipukul mundur dan Suriah berhasil merebut kembali kota-kota penting mereka akibat bantuan dari militer Rusia.

Amerika Serikat

Amerika Serikat jelas merupakan salah satu pihak yang paling keras menyuarakan agar Presiden Bashar al-Assad mundur dari jabatannya. Terutama karena pemerintah Suriah menurut Amerika Serikat, telah melakukan salah satu pelanggaran kemanusiaan yang tidak dapat diampuni, yaitu menggunakan senjata kimia untuk melawan rakyatnya sendiri. Amerika Serikat juga menyebut Suriah sebagai negara anti-demokrasi, dan dianggap membiarkan kelompok terorisme ISIS tumbuh sekaligus menyebar secara luas di Timur Tengah. Secara tegas, Amerika Serikat menyatakan dukungannya kepada aliansi oposisi Suriah, khususnya mereka yang melabeli diri mereka sebagai oposisi moderat. Namun, dikarenakan FSA saat ini telah terbagi ke dalam banyak kelompok, sulit untuk memastikan kepada siapa Amerika Serikat memberikan pendanaannya.

Mulanya, keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di Konflik Suriah terjadi pada tahun 2014 ketika serangan udara Amerika Serikat pertama kali diluncurkan di tanah Suriah untuk melawan ISIS. Pada tanggal 13 April 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis telah meluncurkan 13 rudal ke Suriah sebagai hukuman terhadap Presiden Bashar al-Assad yang diduga menggunakan senjata kimia lagi kepada warga sipil (Associated Press The National, 2018).

Irak

Kesuksesan pemerintah Suriah mempertahankan posisi Bashar al-Assad hingga saat ini juga tidak terlepas dari peran penting Irak. Dukungan Irak terhadap pemerintah Suriah

melalui peran politik dan militernya telah memberikan Assad kekuatan yang besar. Bahkan Irak mengizinkan militernya berperang secara langsung di tanah Suriah. Irak khawatir apabila tatanan politik di Suriah berubah, ada kemungkinan Negara-negara Teluk akan diuntungkan. Jadi, walaupun harus bekerjasama dengan Iran dan Rusia, Irak tidak keberatan mengirimkan bantuannya kepada Suriah (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 9).

Iran

Iran sama halnya dengan Rusia, merupakan salah satu mitra penting Suriah. Selama ini, Iran terus mendukung pemerintah Suriah dengan memberikan bantuan mulai dari mengesahkan intervensi *Islamic Revolutionary Guards Corps* (IRGC), *Ground Forces*, *Intelligence Services*, dan pasukan Quds, kemudian Iran juga memberikan bantuan ekonomi terhadap militer pemerintah Suriah dan secara aktif berkontribusi melalui penyediaan senjata dan penasihat perang kepada kelompok-kelompok pro pemerintah. Awalnya, Iran membatasi keterlibatannya pada Konflik Suriah dengan hanya menyediakan bantuan teknis dan ekonomi. Ternyata seiring berjalannya waktu, Iran mulai serius dalam menanggapi Konflik Suriah. Pada tahun 2016, tercatat ada sekitar 7000-9000 personil paramiliter Iran dan IRGC yang dikerahkan ke Suriah. Diyakini, perubahan peta politik di Suriah dapat mengakibatkan melemahnya pengaruh Iran di Suriah, oleh karena itu Iran mempertahankan pemerintah Suriah demi kepentingannya di kawasan (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 8).

Negara-negara Teluk

Negara-negara Teluk khawatir terhadap meningkatnya pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Apalagi jika pemerintah Suriah berhasil memenangkan konflik. Iran pasti tidak akan melewatkan kesempatan tersebut dan mengacaukan stabilitas kawasan. Sejauh ini, Negara-negara Teluk telah menjadi sponsor utama kelompok-kelompok oposisi (Geneva International Centre for Justice, 2017, hal. 9).

C. Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Suriah

Hubungan kedua negara terbilang baik di sektor diplomatik dan ekonomi. Namun pasca *Arab Spring*, keduanya mulai merenggang dan hubungan mereka semakin memburuk. Tidak lama setelah konflik bergulir, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah ditandai dengan penarikan Duta Besarnya di Damaskus. Raja Abdullah menyebut tindakan kekerasan rezim Assad “tidak dapat diterima” dan memintanya untuk segera berhenti sebelum terlambat. Pada tanggal 6 Agustus 2011, lebih dari 80 orang meninggal dan 50 lainnya terluka akibat serangan militer Suriah terhadap aktivis demonstran (BBC, 2011).

Fenomena *Arab Spring* membawa kekacauan luar biasa terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Arab Saudi tentu saja tidak tinggal diam, intervensi-intervensi yang dirasa perlu, dilakukan secepat mungkin untuk mengatasi kelompok-kelompok revolusioner. Suriah sebagai salah satu negara yang sedang bertarung dengan gerakan ini pun tidak luput dari pantauan Arab Saudi. Raja Abdullah secara agresif menyatakan dukungannya terhadap pihak oposisi dan meminta Bashar al-Assad mundur dari jabatannya sebagai kepala negara. Arab Saudi beberapa kali mengajukan intervensi militer ke *United Nations General Assembly* (UNGA), dan menekankan kepada dunia internasional untuk tidak mengabaikan keadaan di Suriah (Davytson, 2017, hal. 38-43).

Suriah adalah aktor penting di kawasan Timur Tengah, tidak terkecuali bagi Arab Saudi. 75% penduduknya merupakan Sunni, namun kelompok elit Suriah, termasuk keluarga Bashar al-Assad justru berhaluan Syiah. Maka jangan heran jika Bashar al-Assad mempunyai hubungan baik dengan Iran. Pengamat politik dari Universitas München, Michael Meyer menjelaskan mengapa Suriah begitu penting untuk Iran. Tidak hanya karena keduanya memiliki hubungan baik sebagai mitra kerja sama militer tapi juga karena Suriah berperan penting secara ekonomi dan geopolitik terutama karena Suriah memiliki akses langsung

ke Laut Tengah yang menjadikannya sangat strategis bagi keberlangsungan Iran (Moussaoui, 2014).

D. Keterlibatan Arab Saudi di Konflik Suriah

Persaingan geopolitik antara Arab Saudi dan Iran telah membawa perang proksi mereka yang berlangsung selama bertahun-tahun ke dalam babak baru, yaitu Konflik Suriah. Arab Saudi bukanlah pendukung Assad maupun ISIS. Arab Saudi secara terang-terangan mengalirkan dananya ke kelompok-kelompok militansi di Suriah justru untuk menjatuhkan keduanya (Bremmer, 2018).

Pada pertengahan bulan Desember tahun 2015, setelah putaran kedua pertemuan di Vienna. Arab Saudi menjadi tuan rumah konferensi *Syria's Political and Armed Opposition Factions* yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan bersama antara faksi-faksi oposisi Suriah terkait negosiasi dengan Presiden Bashar al-Assad. Hasilnya, pertemuan ini sepakat untuk membentuk *Higher Negotiations Authority* yang akan melakukan negosiasi langsung dengan pihak pemerintah Suriah. Tidak lama setelah itu, Arab Saudi mengumumkan pembentukan aliansi militer antar negara-negara muslim untuk melawan terorisme. Ada sekitar 30 negara muslim yang tergabung didalamnya dan mayoritas bermazhab Sunni, termasuk Mesir serta Turki (BBC, 2015).

Juru bicara militer Arab Saudi, Jendral Ahmed Asseri (Abdelaty, 2016) mengumumkan “Kerajaan siap berpartisipasi dalam operasi darat apapun yang dapat dilakukan koalisi untuk melawan Suriah”. Pernyataan di atas menunjukkan betapa seriusnya Arab Saudi dalam upayanya untuk menyelesaikan Konflik Suriah. Meskipun begitu, sampai tulisan ini dibuat, belum ada satupun militer Arab Saudi maupun militer negara-negara yang tergabung dalam koalisi dan aliansi dikerahkan secara langsung ke Suriah. Alasannya karena Amerika Serikat pada saat itu masih belum mengambil sikap, melalui juru bicaranya Laksamana Muda John Kirby (Abdelaty, 2016)

menyampaikan “Saya tidak ingin berkomentar secara spesifik tentang pernyataan ini sampai kami benar-benar punya kesempatan untuk meninjaunya”. Baru-baru ini Presiden Trump membuat pernyataan mengejutkan terkait dengan pasukan Amerika Serikat di Suriah. Trump ingin mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat di Konflik Suriah dengan meminta Arab Saudi segera membentuk kekuatan militer dan menggantikan Amerika Serikat menjaga stabilitas di Suriah (Robinson, 2018).

Menanggapi hal tersebut, Pangeran Salman—saat itu belum menjadi Raja—“Kami percaya pasukan Amerika harus tetap tinggal, paling tidak dalam jangka menengah jika tidak jangka panjang” (Hennigan, 2018). Pangeran Salman mengibaratkan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Suriah bak upaya terakhir untuk menahan ekspansi kekuatan Iran di kawasan Timur Tengah. Perkembangan Konflik Suriah yang sudah tidak dapat ditebak lagi arahnya memaksa Muhammad bin Salman al-Saud bertindak cepat. Sebagai Raja, Muhammad bin Salman tidak tanggung-tanggung, ia menjanjikan bantuan sebesar 100 juta dollar kepada pemerintahan Trump apabila Amerika Serikat sepakat untuk mengamankan stabilitas wilayah Suriah. Uang itu masuk rekening Amerika pada tanggal 16 Oktober 2018, hari yang sama ketika Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mendarat di ibu kota Arab Saudi, Riyadh (Hubbard, 2018).